

Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta

ADHISA NURAFIA RAHMA^{1*}; UTPALA RANI²

Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No.39, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

E-mail : adhisarahma111@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2022-12-08

Review : 2022-12-15

Publish : 2023-01-26

Abstract: One of the improvements in a strong financial governance system is the use of E-Budgeting in financial transparency. Since 2017, Surakarta City Government has implemented E-Budgeting services. This study attempts to describe how E-Budgeting supports budget transparency in the Surakarta City Government. Through online observations and literature reviews, a descriptive methodology was used to perform this study. The findings of this study suggest that E-Budgeting is crucial in promoting budget transparency within the Surakarta City Government. The Surakarta City Government implements budget transparency services, including e-budget.surakarta.go.id and ppid.surakarta.go.id. Additionally, the Surakarta City administration offers ULAS services as a support for populace ambitions and grievances. The accolade issued by the Supreme Audit Agency with the label Unqualified for twelve consecutive times shows the Surakarta City Government's success in sound financial management. This study makes recommendations, including the requirement for community socialization to boost community involvement in Surakarta City Government budget supervision.

Keywords: *Budget Transparency, City Government, E-Budgeting, E-Budgeting Implementation*

Pengelolaan keuangan suatu daerah yang transparan dan akuntabel diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena seluruh anggaran yang digunakan dapat diketahui secara umum. Transparansi sangat penting supaya semua dana yang direalisasikan bisa lebih tepat sasaran karena dipantau oleh publik sehingga pemerintah tidak memiliki celah untuk mencurangnya. Transparansi dapat didukung dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin maju.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi pada akhirnya mengubah struktur organisasi serta hubungan sosial dan masyarakat. Hal ini berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat di berbagai bidang. Sektor publik yang terdapat dalam organisasi pemerintah adalah salah satunya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan terciptanya model pelayanan publik (E-government) berbasis elektronik (Soesetyo & Kasiyanto, 2013). Saat ini pemerintah sedang membuat metode penyusunan anggaran yang

menggunakan software komputer berbasis web untuk mempermudah prosesnya atau bisa juga dipahami sebagai informasi tentang statistik keuangan, sebagai salah satu perkembangan dari good governance dan bentuk informasi teknologi serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan anggaran.

Pada acara Festival Anti-Korupsi di Gedung Graha Sabha Pramana, Universitas Gajah Mada tahun 2014 dalam pidatonya, Presiden Jokowi memerintahkan semua daerah harus membuat sistem *E-Budgeting*. Sistem itu berlaku untuk pemerintahan pusat maupun daerah. Karena pada saat itu maraknya tindak korupsi dengan menerapkan sistem *E-Budgeting* bisa dengan mudah mengontrolnya dan diharapkan bisa mencegah korupsi.

E-budgeting bertujuan untuk mewujudkan salah satu program pemerintah, yaitu kejujuran. Setiap instansi pemerintah wajib menjaga integritasnya. Berperilaku dan

mengatakan yang sebenarnya, jangan melakukan pungutan liar, mengelola APBN dan APBD dengan jujur dan berdasarkan aturan yang berlaku. Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menjadikan pelaksana kebijakan lebih transparan dan akuntabel kepada publik melalui program kejujuran dan amanat UU. Tujuan penerapan E-Budgeting adalah untuk meningkatkan akurasi data, menyederhanakan penganggaran, membuat data lebih transparan dan sulit untuk dipalsukan, menyusun RKA lebih mudah, menghasilkan laporan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan lainnya. Oleh sebab itu, e-budgeting diyakini dapat mengurangi atau mencegah seseorang untuk melakukan tindak korupsi.

Pelaksanaan *E-Budgeting* di pemerintah wilayah sejalan dengan pertumbuhan sistem pengelolaan keuangan wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 - 2019 yang tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 melaporkan kalau kenaikan sistem pengelolaan keuangan wilayah lewat pelaksanaan *E-Budgeting* jadi sasaran untuk kenaikan mutu belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintah wilayah. Pemerintah pusat ikut membagikan sokongan supaya pemerintah wilayah yang bersangkutan bisa mengelola keuangan wilayah secara handal.

Pemerintahan Kota Surakarta menjadi salah satu pemerintah wilayah yang mempraktikkan *E-Budgeting* dan pencapaian yang berhasil diraih yaitu memperoleh Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut. Opini WTP sendiri merupakan menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua aspek yang relevan dan sesuai standar akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Predikat opini WTP dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sebagai perwujudan komitmen nyata pemerintah pusat kepada daerah, untuk senantiasa membangun tata Kelola

keuangan yang sehat dan tepat. Penghargaan ini diterima langsung oleh Walikota Surakarta, didampingi Wakil Walikota dan Ketua DPRD. Acara berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 27 Mei 2022.

Berikutnya, selaku wujud komitmen dalam mewujudkan transparansi, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan layanan transparansi anggaran lewat sebagian website semacam e-budget.surakarta.go.id, apbd.surakarta.go.id serta Laporan Keuangan lewat ppid.surakarta.go.id. Dengan adanya pandemi Covid-19 sama sekali tidak mempengaruhi layanan website E-Budgeting, karena layanan ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi yang diinginkan melalui situs web ini.

Pemerintahan Daerah adalah suatu instansi yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan oleh PemDa (Pemerintah Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota Pemkot) terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Kantor Wilayah, Instansi Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa.

Penganggaran adalah gagasan yang membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya. Anggaran adalah seperangkat perkiraan yang dapat digunakan sebagai rencana untuk melakukan tindakan perusahaan dari waktu ke waktu, terutama

di masa depan, menurut Harahap (2001:15).

Anggaran adalah rencana keuangan berkala yang terorganisir dengan baik sesuai dengan program yang disetujui. Anggaran adalah rencana tertulis yang diformalkan untuk tindakan organisasi yang diukur dan sering direpresentasikan dalam istilah keuangan selama periode waktu tertentu (Nafarin, 2004:12).

Transparansi mengacu pada kemampuan publik untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Transparansi menurut Mardiasmo (2002:31) adalah kesediaan pemerintah untuk berbagi informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik dengan mereka yang membutuhkannya, termasuk masyarakat umum (Gunawan, 2016).

E-Budgeting adalah sistem penganggaran berbasis web atau aplikasi perangkat lunak yang membantu penganggaran daerah (Rahman, 2018). E-budgeting oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dapat memberikan informasi yang relevan kepada otoritas pemerintah (eksekutif dan legislatif). Dalam hal inisiatif masa depan untuk mempromosikan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah, pengambilan keputusan yang kompeten adalah hal yang penting. E-budgeting merupakan penggunaan program komputer berbasis web yang mencakup pendekatan penganggaran untuk mempermudah proses pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan penelitian secara sistematis, detail, mendalam serta dapat mengungkap makna dari sebuah fakta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada situs website

pemerintah Kota Surakarta dan studi kepustakaan.

HASIL

Karena banyak terjadi penyimpangan dalam birokrasi, masyarakat mulai tidak percaya kepada pemerintah. Melayani masyarakat dan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah. Bagaimana tujuan ini dapat terpenuhi jika penduduk telah kehilangan kepercayaan pada pemerintah? Untuk meminimalisir kecurangan yang mulai banyak terjadi di birokrasi, pemerintah mengelola APBD dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yaitu E-Budgeting.

Data yang transparan dapat digunakan dalam implementasi E-Budgeting untuk menunjukkan sistem keuangan yang dialokasikan dan dapat menjadi pengukur seberapa efektif pemerintah telah memanfaatkan anggarannya. Kota Surakarta sendiri telah menerapkan sistem *E-Budgeting* sejak tahun 2017 terbukti dimana data yang dapat diakses dari tahun 2017.

Manfaat *E-Budgeting* terhadap Pemerintah Kota Surakarta

Penerapan *E-Budgeting* dalam pemerintahan memang sudah banyak memberikan dampak yang positif terhadap program-program pemerintah. Manfaatnya dengan menerapkan *E-Budgeting* ini diantaranya yaitu:

Memberikan Kemudahan Mengakses Data

Karena sistem *E-Budgeting* tersedia secara online jadi siapapun bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun tanpa batasan waktu yang ada dan tidak hanya masyarakat Kota Surakarta saja tetapi masyarakat manapun bisa juga mengaksesnya.

Lebih Jelas dalam Perincian Anggarannya serta Terjaganya Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik secara otomatis akan meningkat sebagai akibat dari penggunaan *E-Budgeting* yang sangat transparan. Setiap departemen di perusahaan akan merasa pekerjaannya diperhatikan oleh semua pihak internal, yang akan mendorong setiap orang untuk lebih akuntabel. Hal ini berbeda dengan sistem penganggaran manual, di mana hanya pimpinan departemen yang bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Menekan Risiko Korupsi

Tujuan utama dari *E-Budgeting* adalah membuat setiap laporan di dalamnya lebih transparan, sehingga semua pihak yang berwenang atau semua masyarakat dapat melihatnya. Hal ini akan mengurangi niat seseorang melakukan korupsi dengan cara memanipulasi semua data keuangan yang ada. Karena akan memudahkan masyarakat mengetahui jika ada perubahan anggaran yang tidak wajar.

Dokumentasi Data yang Lebih Efektif dan Implementasi yang Lebih Efisien

Dalam sistem *E-Budgeting*, pasti data yang disimpan menjadi lebih efektif karena data akan otomatis tersimpan berdasarkan jenisnya serta pendukung lainnya. Hasilnya, dapat membuat proses dokumentasi data menjadi lebih efisien. Dengan satu klik, Anda dapat mengakses berbagai laporan yang diperlukan.

Memudahkan Evaluasi

Tidak perlu menunggu lama untuk melakukan evaluasi dalam sistem *E-Budgeting*. Sistem *E-Budgeting* ini akan menunjukkan kinerja masing-masing departemen. Akibatnya, *E-Budgeting* dapat mengurangi waktu dan meningkatkan efisiensi dan akurasi proses evaluasi.

Layanan *E-Budgeting* terhadap Transparansi Anggaran

Daerah yang sudah menerapkan *E-budgeting* salah satunya adalah Pemerintah Kota Surakarta dan berhasil memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Predikat (WTP) dari (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan sebanyak dua belas kali berturut-turut. Predikat Opini WTP ini merupakan gelar kebanggaan yang dapat menjadi citra positif yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surakarta telah mengelola keuangan secara transparan dan bebas korupsi.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan menghadiri musrenbang Bappeda yang diadakan setiap tahun untuk membahas masalah dan menentukan prioritas pembangunan. Musrenbang diadakan di Balaikota Surakarta untuk membahas dan menyusun rencana pembangunan nasional tiga tahap. Ketiga tahapan tersebut meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 20 tahun), Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahun), dan Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP, 1 tahun).

Untuk mendorong perencanaan partisipatif yang dilakukan dalam Musrenbang ini, para pemangku kepentingan termasuk walikota dan wakil walikota serta berbagai undangan dari pemerintah daerah, staf ahli, camat, kepala desa, organisasi profesi, dan lainnya berkumpul. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan rancangan dan rencana akan diprioritaskan.

Partisipasi dalam Musrenbang ini terbuka untuk semua orang di Surakarta yang memiliki pemikiran, ide, atau saran untuk kemajuan kota Surakarta. Masyarakat dapat menyampaikannya kepada perwakilan atau pemimpin lokal lingkungan masing-masing untuk disampaikan pada Musrenbang 2022. Infrastruktur, pemerintahan umum, masalah sosial budaya, dan masalah ekonomi termasuk dalam kategori tema pembahasannya.

Tersedianya akses publik untuk menyampaikan pendapat merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan transparansi. Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan layanan transparansi anggaran melalui beberapa website yang dapat digunakan untuk melihat APBD Kota

Surakarta.

Website <https://ebudget.surakarta.go.id/web/>

Website ini memberikan informasi anggaran pada tahap perencanaan anggaran. Mulai dari Data Musrenbang, Data Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perencanaan KUA/PPAS, Perencanaan Penetapan Kinerja, Perencanaan KUA/PPAS Perubahan, Evaluasi Hasil Renja, Perbandingan KUA/PPAS dan Anggaran Penetapan hingga Pagu Perubahan. Dalam menu Perbandingan KUA/PPAS dan Anggaran Penetapan juga memberikan informasi anggaran setiap OPD hingga detail rencana program kegiatan dan rencana belanja. *United Nations Development Programme* dalam Adisasmita (2011:24) menyebutkan bahwa transparansi sebagai salah satu prinsip *good governance* dibangun berdasarkan keleluasaan aliran informasi yang dapat diakses oleh orang yang membutuhkan secara langsung, harus sederhana agar mudah dipahami dan pelacakan informasi. *E-Budgeting* sangat penting untuk membuat anggaran dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat umum, khususnya warga Kota Surakarta.

Tetapi masih ada beberapa informasi yang belum disampaikan dari website ini, seperti isi data data musrenbang kelurahan 2017 yang hanya 0, sedangkan isi data tahun anggaran 2018, 2019, 2020, dan 2021 sudah tercantum dengan jelas, namun data tahun anggaran 2022 belum dicantumkan sama sekali karena masih pertengahan periode. Selain itu, meskipun situs web ini ditujukan untuk masyarakat umum, tetapi ada beberapa yang tidak bisa mengaksesnya karena keterbatasan alat dan pemahaman akan teknologi.

Website <https://ppid.surakarta.go.id/>

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai Instansi Publik sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor

067/21.1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta.

Menurut definisi informasi adalah “suatu pernyataan, gagasan, atau kalimat yang mengandung makna, baik berupa keterangan, fakta, maupun penjelasan tertulis yang tidak tertulis, tampak, terdengar, dan terbaca, disajikan dalam berbagai format dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. informasi yang dibuat, dikelola, disimpan, disampaikan, atau diterima oleh suatu entitas, baik elektronik maupun tidak”.

Setiap orang memiliki hak atas dasar akan informasi. Menjunjung tinggi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri serta mencapai pemerintahan yang efektif dan keterbukaan informasi yang terbuka adalah salah satu kualitas kunci dari negara yang demokratis. Peningkatan pengawasan publik terhadap manajemen negara dan entitas publik lainnya dimungkinkan melalui keterbukaan publik yang lebih besar.

Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab dan tugas PPID: Membuat dan menerapkan kebijakan layanan informasi publik; Menyiapkan laporan berkaitan dengan kebijakan yang mengatur layanan informasi publik dilaksanakan; Koordinasi serta pemantapan penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; Koordinasi dan konsolidasi dari PPID dan/atau petugas lainnya dalam pengumpulan dokumen informasi publik; Verifikasi dan catat informasi yang tersedia untuk umum.

Website Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) <https://ulas.surakarta.go.id/>

Website ULAS merupakan bentuk layanan masyarakat Surakarta dalam menyampaikan Aspirasi dan pengaduan, baik kritik maupun saran. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Surakarta menciptakan ULAS, sebagai sarana perantara dalam mengetahui ketidakpuasan masyarakat Kota Surakarta dalam pelayanan publik yang

diterima. Karena kritik dari masyarakat sangat berguna dalam membangun kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

ULAS diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Unit Layanan Pengaduan Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 dan disempurnakan dengan Keputusan Walikota Unit Layanan Pengaduan Surakarta Nomor 337.05/171 Tahun 2019 tentang Pengelola Unit Layanan Aduan Surakarta. Disebutkan, pengelola ULAS memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi, mediasi dan juga laporan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait aduan yang diterima.

Masyarakat Surakarta bisa mengaksesnya melalui situs web atau bisa mendownload aplikasinya melalui Playstore. Keluhan seluruh masyarakat yang masuk kemudian akan ditindak lanjuti oleh pengelola ULAS tersebut dalam jangka waktu 3x24 jam. Diharapkan masyarakat Surakarta dapat memanfaatkan situs web ini dengan baik agar terciptanya pelayanan publik yang lebih optimal.

Faktor Keberhasilan penerapan E-Budgeting

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan suatu penerapan E-Budgeting salah satunya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki unit organisasi dalam memanfaatkan sistem informasi *E-Budgeting* sangat terkait dengan efektifitas penerapan *E-Budgeting* dalam pengelolaan keuangan. Tingginya kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di organisasi sektor publik dapat berkontribusi pada penyebaran keberhasilan peningkatan sistem informasi dalam mencapai tujuannya. Tingkat pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan merupakan indikator yang baik dari kualitas sumber daya seseorang (Anjani & Wirawati, 2018). Banyak faktor tambahan, selain sumber daya manusia, diyakini berdampak pada penerapan e-budgeting, seperti ukuran organisasi, keselarasan antara pendapatan dan beban kerja, dan dukungan atasan langsung (Kusnadi et al., 2021).

PEMBAHASAN

Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Kota Solo dalam pengimplementasian E-Budgeting

Segala sesuatu tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya suatu hambatan atau tantangan, tidak terkecuali Pemerintah Kota Surakarta dalam implementasi E-Budgeting ini. Berikut diantaranya tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Surakarta:

Kemungkinan diretas atau dihack

Salah satu kelemahan utama situs web adalah diretas, orang yang paham IT sangat mudah dalam memanipulasi suatu situs. Agar kemungkinan diretasnya kecil maka pihak pemerintah harus memiliki minimal satu orang yang ahli IT untuk memantau pergerakan situs E-Budgeting. Selanjutnya, keamanan sistem harus diperketat lagi, hacker tidak boleh menghapus laporan keuangan yang telah disusun sehingga menghambat kelancaran aliran dana anggaran pemerintah yang telah dialokasikan sebelumnya.

Diperlukan pengamanan dari Virus

Sama halnya dengan diretas, virus dapat menyebabkan kerusakan sistem, menghapus data maupun menghilangkan seluruh data laporan keuangan yang ada pada situs *E-Budgeting*. Virus dapat menyebar melalui penjelajahan, penggunaan internet, atau pengunduhan data yang terinfeksi sebelumnya. Virus dapat dihindari dengan menggunakan program antivirus yang bagus, dan harus selalu mencadangkan data, sebagai antisipasi untuk kedepannya.

Masyarakat yang kurang paham akan teknologi

Tidak semua warga Surakarta mempunyai teknologi informasi (smartphone) dan mengerti akan teknologi yang ada. Sehingga harus rutin mengadakan sosialisasi untuk masyarakat yang kurang paham teknologi agar masyarakat bisa lebih

paham bagaimana memanfaatkan teknologi. Selain dengan sosialisasi juga bisa melakukan pelatihan sebagai pengembangan kemampuan masyarakat.

Perbedaan sebelum dan sesudah penerapan E-Budgeting

Transparansi harus dikedepankan oleh otoritas publik yang bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu, dalam menunjukkan komitmennya sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya terhadap Keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan E-Budgeting. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut:

Perbedaan sistem

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang ada, pemerintah terus dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai kontribusinya mengelola keuangan daerah. Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dilakukan secara manual dimana hal itu belum efektif dan efisien, hal tersebut dilakukan pemerintah sebelum adanya penerapan E-Budgeting.

Karena dapat langsung memantau penggunaan anggaran, masyarakat mulai menjadi lebih percaya kepada pemerintah setelah adanya penerapan *E-Budgeting*, dalam perealisasiannya. Serta menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab atas perannya sebagai pegawai negeri.

Sebelum adanya *E-Budgeting*, proses penyusunan anggaran masih bersifat manual, menyebabkan pemerintah membutuhkan waktu yang lama, pengeluaran yang besar, dan alur yang lambat, sehingga pelaksanaan anggaran tidak efektif dan tidak efisien. Sedangkan karena terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan, penerapan E-Budgeting dapat menghemat waktu dan biaya persiapan. Implementasi pemerintah secara signifikan menjadi lebih efektif dan efisien dengan penerapan E-Budgeting (Julianty, 2020)..

SIMPULAN

E-Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta didukung melalui penerapan layanan website diantaranya e-budget.surakarta.go.id dan ppid.surakarta.go.id. Dimana website tersebut sudah menginformasikan anggaran pemerintah yang telah terealisasi maupun yang belum direalisasi. Website tersebut memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang unggul pelaksanaan *E-Budgeting* tidak akan berjalan dengan lancar. Pemerintah Kota Surakarta memiliki otoritas untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, komunitas sektoral dan stakeholders lainnya dalam Musrenbang dan Diskusi Kelompok Terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses yang berlangsung mampu mendukung pencapaian akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Surakarta sekaligus sebagai upaya mewujudkan *good governance*.

DAFTAR RUJUKAN

- Andhayani, A. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 183–193.
<https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Andriyanto, D., Baridwan, Z., & Subekti, I. (2019). Antecedent Perilaku Penggunaan E-Budgeting: Kasus Sistem Informasi Keuangan Desa di Banyuwangi, Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 151–170.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.13938>

- Anjani, P. W., & Wirawati, N. G. P. (2018). Pengaruh Usia, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Efektivitas Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*.
<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v2.2.i03.p29>
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72.
<https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Julianty, A. F. (2020). Analisis Implementasi E Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(4).
- Kusnadi, N., Kamper, J., Barat, J., Nanggroe, L. W., Polisi, W. H., Informasi, S., & Aset, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan E-Budgeting Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Aceh. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 147–161.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2106>
- Mutamimmah, M. R., Kustono, A. S., & Effendi, R. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 105.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7746>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77.
https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Permatasari, O., & Biduri, S. (2021). Implementasi E-Budgeting in the Era of the COVID-19 Pandemic at the Regional Secretariat of Sidoarjo Regency. *Academia Open*, 4, 1–12.
<https://doi.org/10.21070/acopen.4.2021.2069>
- Rahman, R. A. T. (2018). Analisis Implementasi E-Budgeting dengan Menggunakan Model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(2).
<https://doi.org/10.21609/jsi.v14i2.695>
- Soesetyo, A. B., & Kasiyanto, K. (2013). Kebijakan Sistem Pemerintahan E-Government di Kabupaten Tulungagung. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 1(1).
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.423>
- Virgiana Ningsih, R. N. S. dan M. R. (2018). Analisis Penerapan E-Planning Dan E-Budgeting Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, 26, 18–31.